

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan organisasi atau perusahaan perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya yang berorientasi non profit. Perusahaan yang berorientasi non profit biasanya menggunakan pendapatan atas jasa yang diperoleh untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya agar dapat terus memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi serta memiliki instrument organisasi yang handal menjadikan rumah sakit tetap bertahan sebagai pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelayanan yang cepat tentunya harus di lakukan oleh rumah sakit di dukung dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tepat, cepat, dan benar. Menurut (Waluyo, 2014) Instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang penting yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menerapkan pola

pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sebagaimana sebuah organisasi, juga rentan terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam mengelola keuangan dapat menjadi ancaman terjadinya tindak pencurian atau korupsi. Apapun penyimpangannya dapat berpotensi untuk menimbulkan kerugian terhadap rumah sakit. Oleh karena itu untuk mengatasi kecurangan maka audit internal memerlukan sistem pengendalian internal dalam sebuah perusahaan.

Melihat dari beberapa kasus Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo, mengungkapkan terakait penghentian distribusi obat yang dilakukan sejumlah Distributor. Direktur Keuangan RSUD Sawerigading, kepada SINDOnews Makassar menjelaskan adanya tunggakan biaya pembayaran obat-obatan kepada sejumlah distributor. Disebutkan secara keseluruhan nilai tunggakan tersebut mencapai Rp5 miliar. "Bahwa terkait sejumlah distributor obat melakukan stop suplai ke RSUD Sawerigading itu benar. Hal ini terkait dengan pengadaan obat melalui e katalog dimana jangka waktu pembayaran 30 hari," ujar Haifa (Sumber: <https://makassar.sindonews.com>, 2018). Salah satu penyebab terjadinya dibidang kesehatan yaitu tata kelola keuangan yang masih kurang baik, maka dari itu penting bagi sistem pengendalian internal rumah sakit untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit berjalan dengan semestinya.

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan kecurangan serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar. Sebaliknya jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin (Purwitasari, 2014).

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Sawerigading Palopo sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan surat keputusan Walikota Palopo tanggal 09 April 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang penetapan RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) dengan status badan layanan umum daerah penuh, dan mulai diterapkan sejak 01 Januari 2014. Adapun konsekuensi bagi RSUD Sawerigading Kota Palopo yang menerapkan PPK-BLUD penuh yaitu mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien, dengan perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi BLUD, rumah sakit juga sangat memerlukan audit internal untuk mengawasi sistem pengendalian internal agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, terdapat gap penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan, seperti penelitian (Njonjie *et al.*, 2016) hasil

penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangandalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian (Pujiono, *et al.*, 2016) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas sistem pengendalian internal sebagai fungsi internal auditor sangat dibutuhkan oleh pihak Rumah sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo dalam mengontrol sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan agar berjalan efektif dan efisien.Saat ini RSUD Sawerigading Palopo telah memiliki Sistem Pengendalian Internal untuk mengupayakan pengendalian pengelolaan rumah sakit, namun sangat penting untuk diketahui apakah unit tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit.Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (RSUD) Sawerigading Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo, disamping itu melalui penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu khususnya audit internal.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Tentunya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai seperti apa sistem pengendalian internal yang digunakan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo

b. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi bermanfaat dan juga sebagai referensi bagi pembaca menjadi motivasi dalam menelusuri kasus yang perlu diteliti.

1.4.3 Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pertimbangan yang berguna dan juga sebagai bahan evaluasi Rumah Sakit untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan kesehatan pada Rumah sakit dan juga diharapkan rumah sakit dapat mengambil tindakan-tindakan korektif yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapora, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dan usaha untuk menggunakan dana tersebut efisien mungkin. Aspek kegiatannya menyangkut antara lain:

- a. Perencanaan, semua proses membangun strategi untuk membantu perusahaan dalam mengatur keuangan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian, sebagai keseluruhan proses pengelompokan tanggung jawab dan wewenang sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat

digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Sistem Pengendalian Internal, sistem ini memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan, pengendalian internal juga merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu perusahaan salah satunya pada rumah sakit.

Tetapi dalam hal ini peneliti membatasi masalah dalam skripsi ini agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud karena adanya keterbatasan waktu. Dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Landasan Teori

Bagian ini membahas mengenai teori, definisi yang diambil dalam buku atau jurnal dan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Bagian ini membahas mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Donaldson dan Davis (1998), *stewardship theory* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi. Dalam penelitian ini, pihak rumah sakit bertindak sebagai pemegang amanah dan pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi amanah. Dimana, pihak RSUD Sawerigading Kota Palopo mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam menyajikan dan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun melalui pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Teori pelayanan dalam hal ini direktur rumah sakit secara fundamental dianggap mampu untuk bekerja sama dengan yang lain, memiliki sikap kolektif kolegial yang tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori pelayanan terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisasional, perilaku direktur selalu beriringan dengan kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal dimana para manajer berada. Direktur rumah sakit akan mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara direktur dan principal tidak sama, direktur akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian sistem pengendalian internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam (Herawati, 2014) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dalam suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, 2006).

2.2.2 Tujuan sistem pengendalian internal

Tujuan pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2010) dalam (Agrianto, 2014) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi, dengan adanya pengendalian internal yang baik maka akan menjaga kekayaan perusahaan secara fisik maupun non fisik agar tidak mudah disalah gunakan.
- b. Mengecek ketelitian dan kendalan akuntansi, pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Karena ketelitian dan

keandalan akuntansi mencerminkan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan.

- c. Meningkatkan efisiensi, dengan pengendalian internal dapat mencegah terjadinya duplikasi usaha yang tidak perlu dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
- d. Meningkatkan kepatuhan kebijakan manajemen, sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dalam perusahaan dipatuhi oleh karyawan.

2.2.3 Komponen-komponen pengendalian internal

Komponen-komponen pengendalian internal menurut (Diana & setiawati, 2010) dalam (Jayanti, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian, dalam komponen ini meliputi Integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, Komite audit Struktur organisasi, metode penerapan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
- b. Penaksiran resiko yaitu perusahaan harus mewaspadaai dan mengelola resiko atas ancaman yang dihadapinya, karena itu perusahaan harus menggunakan pengendalian internal untuk mengatasi resiko tersebut.
- c. Aktivitas pengendalian dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen seperti desain dokumen yang baik, pemisahan tugas, otorisasi yang memadai, mengamankan harta dan catatan perusahaan, menciptakan pengecekan independen atas pekerjaan

kaaryawan lainnya untuk menghadapi resiko terhadap pencapaian tujuan entitas secara efektif.

- d. Pengawasan dilakukan disetiap kegiatan operasional perusahaan seperti supervise yang efektif, akuntansi pertanggung jawaban, dan pengauditan internal.
- e. Informasi dan komunikasi dilakukan seperti identifikasi dan catat transaksi yang *valid*, klasifikasi transaksi, catat transaksi sesuai nilai moneter yang tepat, penyajian dalam laporan keuangan. Aktivitas-aktivitas ini terdapat sistem informasi dan komunikasi, hal ini memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya.

2.2.4 Konsep-konsep dasar pengendalian internal

Konsep-konsep dasar pengendalian internal antara lain:

- a. Pengendalian internal adalah suatu proses.

Pengendalian internal meliputi serangkaian tindakan yang berkaitan dan terinteraksi, bukan ditambahkan, dengan infrastruktur suatu entitas.
- b. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia.

Pengendalian internal tidak hanya berupa pedoman-pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi meliputi pula unsur manusianya pada setiap level organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.
- c. Pengendalian internal memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut.

- 1) Ada keterbatasan bawaan (*inherent limitations*) dalam semua sistem pengendalian
 - 2) Pertimbangann biaya dan manfaat dalam menciptakan pengendalian.
- d. Pengendalian internal diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

2.2.5 Sasaran pengendalian internal

Struktur pengendlian internal suatu perusahaan, pada umumnya dirancang untuk:

- a. Menjamin dapat dipercayainya catatan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi
- b. Menjaga keamanan aktiva yang dimiliki.

2.3 Pengelolaan Keuangan

2.3.1 Pengertian pengelolaan keuangan daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, dalam (Syafriion, 2015) pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Negara diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2 Azas umum pengelolaan keuangan daerah

Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu.Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undanga, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

- a. Tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan, keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif, pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien, pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis, pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggungjawab, perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan ataau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

- i. Kepatuhan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.3 Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga mewakili Pemerintah daerah dan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3.4 Koordinator pengelolaan keuangan daerah

Sekretaris daerah adalah coordinator pengelolaan keuangan daerah. Tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah coordinator di bidang:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.4 Badan Layanan Umum Daerah

2.4.1 Pengertian badan layanan umum daerah

Badan layanan umum adalah instansi yang berada di lingkungan Pemerintah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Santi, 2009).

2.4.2 Tujuan badan layanan umum daerah

Pemendagri No. 61 tahun 2007 menyebutkan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Yang dimaksud praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan.

2.4.3 Asas badan layanan umum daerah

Badan layanan umum daerah memiliki asas sebagai berikut:

- a. BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

- b. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum terpisah dari pemerintah daerah.
- c. Kepala daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- d. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- g. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dan pengelolaan keuangannya.

2.4.4 Karakteristik badan layanan umum daerah

Menurut PP No. 23 Tahun 2005 BLUD memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu:

- a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara, ini sesuai dengan asas BLUD dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum yaitu BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah

daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

- b. Menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
- c. Tidak bertujuan mencari keuntungan/laba sesuai dengan PP No. 23 tahun 2005 yaitu badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa pencarian keuntungan.

2.4.5 Syarat–syarat badan layanan umum daerah

Kesempatan menjadi BLUD dapat diberikan kepada instansi di lingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang diwajibkan:

- a. Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persyaratan teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.
- c. Persyaratan administratif.

2.4.6 Rumah sakit umum daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan salah satu perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis daerah untuk di Kabupaten Majalengka diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 8).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan memang belum banyak ada. Tetapi banyak penelitian sebelumnya yang memiliki sebagian kesamaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

(Pujiono, *et al.*, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang sesuai dengan tujuan dalam memajukan pembangunan daerah maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

(Yuliani, 2017) melakukan penelitian yang berjudul ‘Pengaruh Penyajian Lporan Keuangan, Krakteristik Kualitatif. Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya organisasi yang memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, tugas dan jabatan terstruktur, kenijakan pemisahan tugas, sistem informasi yang baik, pemeriksaan independensi , pengawasan secara terus menerus dan periodik, pengendalian yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

(Asroel dan Susilatri, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena dalam mencapai sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan pada suatu instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

(Sari, *et al.*, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat karena sistem pengendalian internal suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Fauzi 2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pengendalian internal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dapat terpenuhi jika mampu menyajikan fakta secara jujur dan informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material. Untuk itu diperlukannya sistem pengendalian intern dalam mencegah segala hal yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(Wildan 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Aktualisasi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset”. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat kelamahan penyelenggaraan kegiatan baik pengelolaan keuangan dan asset sehingga belum dapat terlaksananya praktek bisnis yang sehat.

(Windiastuti, 2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu secara bersama-sama Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung.

(Irphani, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan terhadap *Fraud*”. Berdasarkan penelitian tersebut didapat bahwa keempat hipotesis yang diajukan semua didukung. Dimana tekanan berpengaruh terhadap *fraud*, artinya semakin besar tekanan pada pejabat/pegawai di Pemerintah daerah Kota Metro, baik tekanan dari individu itu sendiri, lingkungan kerja, dan luar individu maka semakin tinggi kecenderungan *fraud*. Berbeda halnya pada keefektifan sistem pengendalian internal yang berpengaruh negatif terhadap *fraud*, berarti semakin besar keefektifan sistem pengendalian internal pada pejabat/pegawai di Pemerintah Daerah Kota Metro maka kecenderungan *fraud* akan semakin menurun. Sedangkan perilaku tidak etis dan jabatan dalam pengelolaan keuangan sama-sama berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini berarti semakin besar perilaku tidak etis maupun

semakin tinggi kewenangan dalam pengelolaan keuangan pada pejabat/pegawai di Pemerintah Daerah Kota Metro maka semakin tinggi kecenderungan fraud.

(Wardani, 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh akualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kelaten”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

(Yudianto, 2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

(Iskandar, 2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pmerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin bagus penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin efektif juga pengelolaan

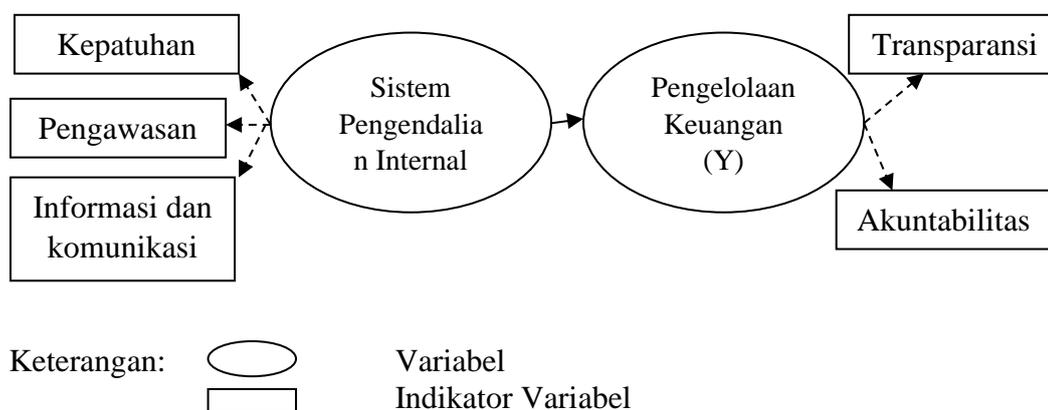
keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah kota Pekanbaru. Semakin kompetensi sumber daya manusia yang bekerja maka pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin meningkat.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan (Y)

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dapat disederhanakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis

Jika sistem pengendalian internal diterapkan dalam rumah sakit, maka akan berdampak baik terhadap kualitas pengelolaan keuangannya. Sistem pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulannya dan penganalisaan data penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho = Diduga bahwa ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan.

Ha = Diduga bahwa tidak ada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelola keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yang dimana bertujuan untuk memecahkan masalah atas apa yang diteliti. Pengertian Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dan erdapat dua instrumen dalam metode survey, yaitu kuesioner (pertanyaan tertulis) dan wawancara (pertanyaan lisan). Kuesioner dapat langsung dikomunikasikan dan dikumpulkan dari responden (secara perseorangan) atau dapat juga dikomunikasikan dan dikumpulkan melalui pos. Wawancara dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telepon. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian purposive sampling dan metode survei yaitu kuesioner dan wawancara. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas dan pengelolaan keuangan sebagai variabel terikat pada RSUD Sawerigading Kota Palopo. Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan bentuk atau model suatu penelitian. Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pilihan desain atau modelnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ditetapkan lokasi dalam penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo, terfokus pada Badan Pelayanan Umum. Adapun waktu penelitian dimulai pada tahun 2020 selama \pm 2 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2011), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Widiyanto, 2010), populasi merupakan suatu kelompok atau kumpulan objek atau subjek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai struktural, pegawai bagian keuangan dan staf administrasi keuangan RSUD Swerigading Kota Palopo sebanyak 49 responden.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan dihadapi diantaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan

untuk populasi. Penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebanyak 49 sampel.

3.3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama, seperti jawaban yang diperoleh dari hasil proses wawancara atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari objek penelitian, seperti struktur organisasi, data kepegawaian dan kelengkapan lainnya. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini yaitu dari responden dimana peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya.

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian yaitu ketersediaan sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dimana data yang mengacu pada informasi yang diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan variable untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada semua responden secara langsung. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bagian keuangan dan staf administrasi RSUD Sawerigading Kota Palopo. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian yaitu mengumpulkan data untuk membantu dalam proses penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

3.5.1 Data primer

- a. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Badan Layanan Umum RSUD Sawerigading Kota Palopo
- b. Kuisioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian disebarkan pada para responden secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat.

3.5.2 Data sekunder

Data ini merupakan pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari:

- a. Daftar pegawai pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan buku-buku yang berhubungan dengan variabel penelitian.
- b. Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini hanya melibatkan dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu system pengendalian internal sedangkan variabel dependennya yaitu pengelolaan keuangan. Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu:

3.5.1 Sistem pengendalian interanal (X)

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan RSUD Sawerigading Kota Palopotentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3.5.2 Pengelolaan keuangan (Y)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berbentuk kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara pengajuan pertanyaan atau pernyataan kepada responden (Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading pada Badan Layanan Umum) untuk selanjutnya dijawab. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Jawaban dari kuesioner tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Instrumen Penelitian Jawaban atas Pertanyaan Skor

Jawaban	Skor
SangatTidakSetuju	1
TidakSetuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 23 (*Statistical Product And Service Solution*) dengan menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi sederhana, koefisien determinasi, dan

uji t, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.7.1 Uji validitas

Uji validitas adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh suatu instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Sugiyono (2013:152) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis item yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari skor tiap butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut sugiyono (2013) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika r hitung (perhitungan dari setiap butir pertanyaan pada kuisisioner) $\geq r$ tabel dengan ketentuan minimal 0.05, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah valid.
- b. Jika r hitung (perhitungan dari setiap butir pertanyaan pada kuisisioner) $\leq r$ tabel dengan ketentuan minimal 0.05, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah tidak valid.

3.7.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach Reliabilitas merupakan

tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Suatu variabel dapat di katakan reliabel atau handal apabila jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data uji, dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's alpha* yang dikerjakan dengan rumus :

$$r_{tt} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right]$$

Keterangan :

r_{tt} = Reliabilitas instrumen

a^2 = Variabel total

ab^2 = Jumlah varians butir

K = Banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal

Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60

3.7.3 Uji analisis regresi linier sederhana

Analisis di lanjutkan dengan regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan membuat persamaan regresi sederhananya, dan menguji keberartian dan kelinieran regresi.

Persamaan regresi sederhana diperoleh dengan bentuk menurut (Misbahudin, 2013)

$$Y = a + bX$$

dimana:

Y = Variabel terikat (pengelolaan keuangan)

X = Variabel bebas (sistem pengendalian internal)

a = Intersept

b = Koefisien regresi (slop).

3.7.4 Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y), nilai koefisien determinasi antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R² semakin kecil, maka kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) rendah. Apabila R² mendekati satu, maka variabel independen (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Y).

3.7.5 Uji t (uji parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan variabel X dan Y, apakah variabel independen (X) benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil RSUD Sawerigading Kota Palopo

a. Sejarah RSUD Sawerigading Kota Palopo

RSUD Swerigading Kota Palopo sebelumnya adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1920 yang merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada pada pusat Pemerintahan Kerajaan Luwu, dalam perjalanan telah mengalami dua kali renovasi yakni renovasi pertama dilaksanakan pada tahun 1981-1982, di masa pemerintahan Bupati Luwu Drs. Abdullah Suara dan peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Oddang. Renovasi kedua pada tahun 2001-2002 di masa pemerintahan Bupati Dr. H. Kamrul, S.H., M.H. Banyak bagian bangunan sudah tidak layak lagi digunakan untuk sebuah Rumah Sakit sehingga memungkinkan sulit untuk dipertahankan keasliannya sebagai bangunan bersejarah.

Rumah Sakit yang sebelumnya memiliki status Rumah Sakit Tipe D, dan tahun 1994 ditingkatkan statusnya menjadi Rumah sakit kelas C, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 396/Menkes/KS/IV/1994 (sebagai kantor). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 9 tahun 2002 RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sebelumnya sebagai kantor berubah menjadi Badan Pengelola.

Ketika Kota Administrasi Palopo sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu mengalami perubahan status menjadi kota Otonom berdasarkan Undang-undang No, 11 tahun 2002, maka RSUD Sawerigading Kota Palopo ini pun beralih induk dari Pemerintah Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo. Perubahan nama dari Badan Pengelola Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah, sehingga ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo sesuai dengan nomor 01 tahun 2009 dan saat ini RSUD Sawerigading Kota Palopo sudah menjadi rumah sakit Tipe B Non Pendidikan.

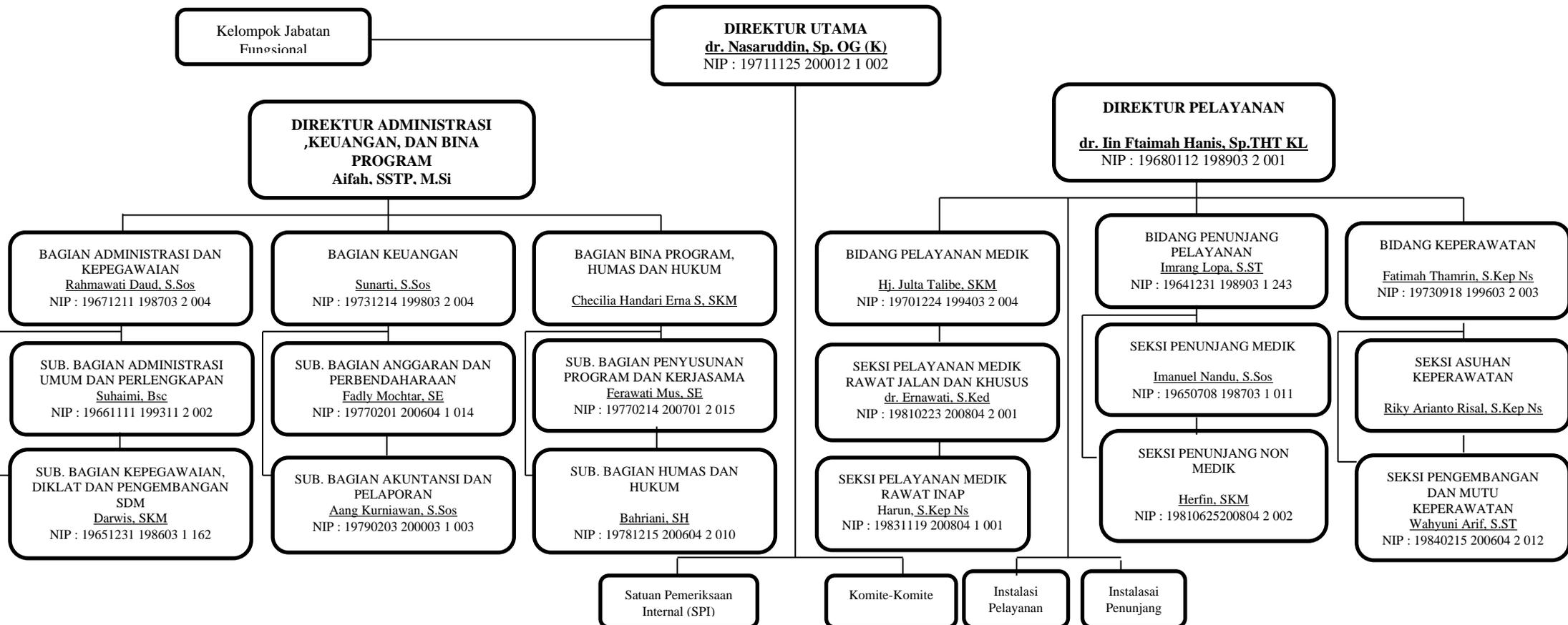
Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo tanggal 9 April 2012 nomor : 397/IV/2012 tentang Penetapan RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, meskipun penerapan pelaksanaannya baru dimulai sejak 1 Januari 2015 dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Konsekuensi bagi RSUD Sawerigading Kota Palopo yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD-RSUD) untuk membiayai seluruh

kegiatan operasional yang berhubung langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

RSUD Sawerigading Kota Palopo berusaha melakukan pembenahan di segala aspek dengan melakukan inovasi dan proaktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, berusaha membangun *image oriented* bahwa pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit lebih dikarenakan tawaran jasa pelayanan dan fasilitas yang dapat mengakomodasikan kebutuhan konsumen. Pengembangan serta penambahan berbagai fasilitas pelayanan yang terus kami lakukan selama ini menunjukkan kepedulian kami terhadap kebutuhan para pelanggan setia yang telah memilih RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai mitra dalam memberikan layanan kesehatan. Penambahan fasilitas di tahun 2012-2018 ini meliputi USG 3 Dimensi, USG 4 Dimensi, ECG, serta *Laparascopy* dan CT-SCAN. Selain penambahan peralatan kesehatan RSUD Sawerigading Kota Palopojuga melakukan renovasi serta perluasan berbagai fasilitas seperti renovasi ICU, penambahan ruang perawatan, penambahan kapasitas tempat tidur, dan lain-lain. Penambahan serta perluasan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang proses pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi yang kami miliki.

b. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok RSUD Sawerigading Kota Palopo

**Susunan Struktur Organisasi Tipe B
RSUD Sawerigading Palopo
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 5 Tahun 2015**



Sumber : Rsud Sawerigading

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berikut adalah tugas masing-masing direksi yang ada di RSUD Sawerigading Kota Palopo:

1. Direktur Utama

Adapun tugas dari Direktur utama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang medik dan non medik. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan kerjasama di bidang medik dan non medik. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang medik dan non medik, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Melakukan pembinaan tenaga struktural dan fungsional dan lingkungan RSUD. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh walikota.

2. Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program.

Tugas Direktur administrasi, keuangan dan bina program yaitu membantu direktur utama dalam melakukan pembinaan, pengawasan, [pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan bina program RSUD. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan bina program dengan direktur pelayanan, instalasi, komite SPI, dan kelompok jabatan fungsional di RSUD, serta mengkonsultasikan kepada direktur utama. Memberikan saran kepada direktur utama tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan RSUD. Menegvaluasi

pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh direktur utama. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan direktorat administrasi dan keuangan. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh direktur utama.

3. Direktur Pelayanan

Tugas direktur pelayanan yaitu menyusun rencana ketatalaksanaan pelayanan medik, keperawatan serta penunjang medik dan non medik. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan penunjang medik dan penunjang non medik dengan direktur administrasi keuangan dan bina program serta kelompok jabatan fungsional. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik an penunjang non medik serta melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh direktur.

c. Visi, Misi, dan Tujuan RSUD Sawerigading Kota Palopo

1. Visi RSUD Sawerigading Kota Palopo

Terwujudnya RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Misi RSUD Sawerigading Kota Palopo

Misi dari RSUD Sawerigading Kota Palopo yaitu menyelenggarakan pelayanan yang terjangkau, berkeadilan dan sesuai standar akreditasi rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan

kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya rumah sakit secara berkelanjutan.

3. Tujuan RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Tujuannya terbagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya pengobatan, pemulihan, pencegahan, promosi kesehatan rumah sakit, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, menjadi RSUD Sawerigading Kota Palopo sebagai pusat rujukan yang peripurna, mengupayakan RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk mampu menjadi pengelola pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan pendidikan kesehatan yang berorientasi kepada kepercayaan dan kepuasan pasien.

4.1.2 Deskripsi dan karakteristik responden penelitian

Uraian dari 49 kuesioner yang di bagikan kepada responden RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan memberikan nilai rata-rata dari hasil 9 pernyataan sistem pengendalian internal (X), yaitu 1 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan netral, dan 33 reponden menyatakan setuju. Sedangkan dari hasil 6 pernyataan pengelolaan keuangan (Y), yaitu 12 responden menyatakan netral, 36 responden menyatakan setuju, dan 1 responden menyatakan sangat setuju.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai struktural, pegawai bagian keuangan, dan staf administrasi keuangan RSUD Sawerigading

Kota Palopo yang berjumlah 49 orang. Adapun karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian yaitu meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi reponden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Total	Presentase
Laki-laki	22	45%
Perempuan	27	55%
Jumlah	49	100%

Sumber: Data primer 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 22 orang atau 45% sedangkan perempuan berjumlah 27 orang atau 55% dalam urusan pekerjaan perempuan cenderung lebih teliti dan rapi dibandingkan dengan laki-laki ditambah dengan pekerjaan sebagai pengelola keuangan yang dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam pembuatan laporan, sehingga memungkinkan kinerja lebih maksimal.

b. Responden berdasarkan usia

Tabel 4.2
Responden berdasarkan usia

Usia	Total	Presentase
25 - 30 tahun	9	18,4%
31 - 40 tahun	12	24,4%
41 - 50 tahun	21	43%
>50 tahun	7	14,2%
Jumlah	49	100%

Sumber: Data primer 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat terlihat bahwa rata-rata responden berusia 41-50 tahun terlihat dari presentase tertinggi yaitu 43% atau 21 orang, 24,4% atau 12 orang berusia 31-40 tahun, 18,4% atau 9 orang berusia 25-30 tahun, kemudian presentase terendah 14,2% atau 7 orang berusia >50 tahun. Dari segi usia mayoritas pegawai struktural, pegawai bagian keuangan dan administrasi keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo berusia di bawah 50 tahun atau masih dalam usia produktif sehingga lebih dinamis dalam bertindak, mempunyai kemampuan fisik yang kuat dan mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan serta berani mengambil resiko.

c. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.3
Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Total	Presentase
S2	11	22,5%
S1	25	51%
Diploma	10	20,5%
SMA	3	6%
Jumlah	49	100%

Sumber: Data primer 2020

Dari tabel di atas bahwa tingkat pendidikan terakhir yang menjadi responden dalam penelitian ini presentase tertinggi yaitu S1 sebesar 51% atau 25 responden, S2 sebesar 22,5% atau 11 responden, Diploma sebesar 20,5% atau 10 responden dan SMA sebesar 6% atau 3 responden. Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas responden telah memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu S1.

4.1.3 Uji validitas

Uji validitas merupakan pengujian untuk yang dilakukan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner, hal tersebut dapat diketahui dengan membanding nilai r_{hitung} (tabel correlated item-total correlation) dengan r_{tabel} (tabel product moment dengan signifikansi 0,05), suatu penelitian dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil r_{hitung} dari 9 pernyataan (X) dalam kuesioner penelitian pada variabel independen yaitu sistem pengendalian internal dan 6 pernyataan (Y) dalam kuesioner dependen dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas atas Instrumen Variabel Independen
UJI VALIDITAS X DAN Y

VARIABEL	PERNYATAAN	NILAI R HITUNG	NILAI R TABEL	NILAI Sig.	KEPUTUSAN
Sistem Pengendalian Internal	X.1	0.671	0.2816	0.000	VALID
	X.2	0.573	0.2816	0.000	VALID
	X.3	0.706	0.2816	0.000	VALID
	X.4	0.597	0.2816	0.000	VALID
	X.5	0.575	0.2816	0.000	VALID
	X.6	0.397	0.2816	0.000	VALID
	X.7	0.537	0.2816	0.000	VALID
	X.8	0.595	0.2816	0.000	VALID
	X.9	0.453	0.2816	0.000	VALID
Pengelolaan Keuangan	Y.1	0.563	0.2816	0.000	VALID
	Y.2	0.757	0.2816	0.000	VALID
	Y.3	0.487	0.2816	0.000	VALID
	Y.4	0.560	0.2816	0.000	VALID
	Y.5	0.775	0.2816	0.000	VALID
	Y.6	0.721	0.2816	0.000	VALID

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Dari tabel 4.1 didapatkan dua variabel yaitu sistem pengendalian internal (X) dan pengelolaan keuangan (Y). Nilai korelasi dibandingkan dengan r_{tabel} ,

dicari pada signifikan 0.5 dengan $(n) = 49$, maka didapat r tabel sebesar 0.2816. hasil uji di atas didapatkan r hitung lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid.

4.1.4 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuisisioner penelitian yang digunakan memberikan data yang reliabel, data dikatakan reliable apabila mendapatkan hasil yang sama pada setiap pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil statistic *cronbach's alpha* dengan signifikansi 0,6, apabila pengukuran instrument penelitian di atas 0,6 maka data dapat dikatakan reliable, tetapi jika dibawah dari nilai 0,6 maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliable. Hal tersebut ditunjukan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	9

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil perhitungan *cronbach's alpha* 0,736, berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian untuk variabel independen yaitu sistem pengendalian internal (X) dinyatakan reliabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.715	6

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil perhitungan *cronbach's alpha* 0,715, berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner penelitian untuk variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan (Y) dinyatakan reliabel.

4.1.5 Analisis regresi sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). Hal itu dapat dilihat pada persamaan regresi linier sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Regresi Linier Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.117	2.933		3.109	.003
SPI	.441	.080	.628	5.528	.000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9.117,a + 0.411,X$$

Apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstanta yaitu 9.117, apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai Y akan berubah sebesar 0,411 setiap satu satuan X. Dengan pengambilan keputusan dalam uji regresi linier berdasarkan tabel di atas diperoleh

nilai signifikan variabel sistem pengendalian internal sebesar $0.00 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

4.1.6 Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Saat nilai koefisien mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. 5 Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.628 ^a	.394	.381	1.85031	1.676

a. Predictors: (Constant), SPI

b. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,394 yang artinya bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 39,4% terhadap pengelolaan keuangan sedangkan 60,6% di pengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.7 Uji t (uji parsial)

Uji t untuk menguji secara parsial koefisien regresi signifikan atau tidak. Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan kriteria jika nilai t hitung $> t$

tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, jika sebaliknya maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Tabel 4.6 Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.117	2.933		3.109	.003
SPI	.441	.080	.628	5.528	.000

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN KEUANGAN

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t hitung variabel sistem pengendalian internal (X) sebesar 5.528, lebih besar dari t tabel yaitu 2.012 dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ maka variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem pengendalian internal pada RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Peraturan Walikota Palopo No.5 tahun 2016 tentang pola tata kelola keuangan badan layanan umum daerah RSUD Swerigading Kota Palopo, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang bertugas membantu direktur rumah sakit untuk melakukan pengendalian internal pada bidang pelayanan, adminitrasi umum, penatausahaan keuangan dan kegiatan social disekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya sebatas

pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dalam bidang keuangan di RSUD Swerigading Kota Palopo. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo menunjukkan bahwa audit internal termasuk dalam kategori sangat baik.\

Sistem pengendalian internal sebagai audit internal pada RSUD Sawerigading diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam proses pengelolaan keuangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, oleh karena itu sistem pengendalian internal harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Independensi, audit internal harus memiliki sikap independensi atau sikap tidak memihak, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada di RSUD Sawerigading telah memiliki independensi yang memadai. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan unit yang terpisah atau mandiri dan bertanggung jawab kepada direktur, serta para auditor yang berada dalam sistem pengendalian internal terbebas dari pekerjaan operasional atau kegiatan yang akan diauditnya. Kemampuan Profesional, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa audit internal di RSUD Sawerigading Kota Palopo dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai, serta memiliki pemahaman tentang kebijakan dan peraturan yang berhubungan pelaksanaan rumah sakit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahini (2015) yang menyatakan bahwa proses audit yang baik dan berkualitas akan apabila auditor yang melakukannya memiliki kompetensi yang baik dimana

auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan dalam melakukan proses audit. Lingkup pekerjaan, audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal di RSUD Sawerigading Kota Palopo bertanggung jawab dalam menentukan apakah telah ditetapkan suatu standar operasional untuk mengukur ke ekonomisan dan efisiensi sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiman (2017) bahwa peran audit internal senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan Saran rekomendasi apabila di temukan kelemahan-kelemahan. Pelaksanaan audit internal, yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal RSUD Sawerigading Kota Palopo telah memadai, sistem pengendalian internal membuat perencanaan yang mencakup penentuan waktu, personel, dan unit yang akan di audit, sistem pengendalian internal juga memberikan rekomendasi saran tindakan korektif kepada unit kerja.

4.2.2 Penerapan pola pengelolaan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo

Peraturan Walikota Palopo No 5 tahun 2016 tentang pola tata kelola keuangan badan layanan umum daerah RSUD Sawerigading Kota Palopo pasal 41, pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, produktifitas, serta pengelolaan administrasi keuangan berbasis pada akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil

rekapitulasi jawaban responden mengenai penerapan pengelolaan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini di buktikan dengan adanya indikator transparansi dan akuntabilitas yang di respon positif oleh responden.

4.2.2 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam uji koefisien determinasi maka nilai *R square* untuk variabel Y sebesar 0.394. Perolehan nilai tersebut menjeaskan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan sebesar 39,4% dan sisanya 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Hasil pengujian statistic secara parsial antara sistem pengendalian internal (X) terhadap pengelolaan keuangan (Y) menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar $5,528 > t$ tabel 2,012, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya sistem pengendalian internal berpengaruh positif sebesar pengelolaan keuangan RSUD Sawerigading Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pelayanan (*stewardship theory*) yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1998) dimana, pihak RSUD Swerigading Kota Palopomengarahkan semua kemampuan dan keahlian dalam menyajikan dan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Pujiono (2017) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan, dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ade dan Yuyun (2017) yang menyimpulkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan RSUD. Penelitian lain juga dilakukan oleh Acang armana (2015) menemukan bahwa SPI berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG, dimana salah satu GCG adalah pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan keuangandapat berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dengan membagikan kuisisioner Pegawai Bagian Keuangan dan Staf Administrasi BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan di BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. Hal tersebut bisa dilihat dari Uji T.

1.2 Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, tentu peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalamnya. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini. Maka peneliti menyarankan bagi BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo untuk lebih meningkatkan pengendalian dan juga pengawasan terhadap tugas dan fungsi kerja sehingga memberikan dampak terhadap tata kelola organisasi yang semakin baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agrianto, R. S. (2014). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studikasuspada PT. Duta Paper Prigen Pasuruan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1).
- Arens, Alvin., et al. (2006). *Auditing dan Jasa Assurance*. Erlangga: Jakarta. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta
- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal akuntansi*, 1(1).
- Asroel, R. B. S., Basri, Y. M., & Susilatri, S. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Fauzi, M. S. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research*, 11(1), 1-14.
- <https://makassar.sindonews.com/read/14103/4/penjelasan-rsud-sawerigading-soal-penghentian-distribusi-obat-1537434575>
- Irphani, A. (2017). *Pengaruh Tekanan, Kefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Faud (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro)* (Doctotal dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

- Iskandar, J., Ratnawati, V., & Darlis, E. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Ssatuan Kerja Perangkat Daerah kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Jayanti, K. D. (2016). *Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian Kredit Pada BPR Nusamba Ngunut–Cabang Ngadiluwih*. Fakultas Ekonomi PGRI. Kediri.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 1290-1318.
- Misbahudin, I. H., (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mulyadi, 2002. *Auditing. Buku Dua. Edisi Ke Enam*. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 10(2), 79-88.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. 7 November 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 *Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum*. Jakarta: 2005
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *BISMA*, 10(1), 68-81.

- Purwitasari, A. (2014). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung)*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Santi, E. (2009). Implementasi dan kendala penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 4(2), 41-54.
- Sari, E. W., Azlina, N., & Julita, J. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sofyan, A., & SYAFRION, F. Y. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok)* (Doctoral dissertation, Riau University). Pekanbaru.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(2013), Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Thesaurianto, K. (2007). *Analisis pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian Daerah* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO. Semarang.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 *Keuangan Negara.Keuangan Daerah*. Jakarta: 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 *Rumah Sakit*. 28 Oktober 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta.
- Waluyo, B. (2014). Analisis permasalahan pada implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha*, 3, 27-38.
- Wildan. (2016). Aktualisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daN ASET (Study kasus:

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(3).

- Windiastuti, R. (2014). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)*, Fakultas Ekonomi Widyatama. Bandung.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 17(2), 166-175.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1).
- Yuliani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1

